



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 15 Juli 2016

Halaman: 9

Permudah Akses Kredit Pedagang Pasar

● YULIANINGSIH

Pedagang diharapkan tidak terjatuh praktik rentenir.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya mempermudah bantuan kredit untuk para pedagang pasar. Upaya ini bisa dilakukan melalui pengembangan kerja sama antara pemkot dan pihak perbankan.

Pada Kamis (14/7), Pemkot Yogyakarta baru menandatangani nota kerja sama dengan BNI Cabang Yogyakarta yang juga terkait peningkatan ekonomi pedagang pasar dan usaha kecil menengah (UKM). Menurut Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Danang Soebagiono, selama ini pedagang pasar mengaku kesulitan dalam mengakses pinjaman dari bank lantaran terbelit agunan. "Dengan kerja sama ini, pedagang akan dimudahkan," kata dia, kemarin.

Menurut Danang, nantinya pedagang pasar di wilayah Kota Yogyakarta akan diberi kemudahan untuk mendapat bantuan kredit di BNI. Namun, yang mendapat kemudahan ini hanya mereka yang memiliki Kartu Buktai Pedagang (KBP) yang di-

luncurkan Dinas Pengelolaan Pasar (Dinopas) Kota Yogyakarta. Mengenai besaran jumlah pinjaman, kata dia, akan diserahkan pada kebijakan bank terkait. "Yang jelas pemkot yang mem-backup," ujar dia.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menilai, kerja sama dengan perbankan nasional ini merupakan langkah yang baik untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pedagang pasar. "Ini hal yang bagus buat para pedagang untuk peningkatkan dagangan mereka agar tidak terjatuh rentenir," kata dia.

Pemimpin Wilayah BNI KCU Yogyakarta Arif Swasono menjelaskan, kerja sama antara BNI dan Pemkot Yogyakarta terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) ini sudah dimulai sejak 2011. Kemudian dilakukan kerja sama lanjutan dan pengembangannya, antara lain untuk penguatan modal pedagang pasar. "Kerja sama ini untuk memberi layanan terbaik bagi mitra bisnis, utamanya untuk membantu pengembangan SDM," kata dia.

Kerja sama dengan pihak perbankan ini bervariasi. Termasuk juga dalam bidang pendidikan dan pengembangan *cashless society* atau "masyarakat tanpa uang tunai". Untuk menerapkan sistem tersebut, masyarakat harus memiliki rekening tabungan di bank. Haryadi mengatakan, pengembangan sistem transaksi non-tunai itu akan memberikan banyak

keuntungan bagi masyarakat. "Tidak perlu membawa uang tunai ke mana-mana, namun tetap bisa melakukan transaksi. Tentunya kami ingin mewujudkan hal ini," ujar dia.

Menurut Haryadi, untuk pengembangan transaksi non-tunai tersebut bisa diawali dengan membuat percontohan di sekolah, SD maupun SMP. Jika menunjukkan hasil positif, kata dia, penerapannya bisa dikembangkan di sekolah lain.

Terkendala SID

Sementara itu, terkait dengan kredit usaha rakyat (KUR) di Jawa Tengah, diakui sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami hambatan dalam mengaksesnya. Persoalannya terkait dengan persyaratan. "Salah satu persyaratan yang kebanyakan tidak dapat dipenuhi adalah dari sistem informasi debitur (SID)," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Jateng Hana Roichati di Semarang, kemarin.

Dalam persyaratan SID untuk calon debitur KUR ini, Hana menjelaskan, pemohon kredit tidak boleh terikat dengan pembiayaan lain. Kebanyakan yang terjadi, kata dia, calon debitur memiliki tanggungan berupa cicilan sepeda motor atau barang lain dengan *leasing*. Jika memiliki tanggungan dengan lembaga pembiayaan lain, kata dia, pelaku usaha tersebut

tidak bisa mengakses KUR.

Oleh karena itu, menurut Hana, banyak pelaku UMKM yang akhirnya memilih pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh koperasi. Padahal, kata dia, bunga kredit yang ditawarkan oleh koperasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan KUR. Saat ini bunga kredit di koperasi disebut sebesar 18 persen per tahun, sedangkan untuk KUR sebesar sembilan persen. "Pemerintah sudah menurunkan bunga kredit untuk KUR tahun ini dari 12 persen di tahun lalu," ujar dia.

Untuk itu, Hana mengatakan, dinasnya mengimbau kepada pelaku usaha agar bisa memenuhi syarat yang diajukan penyalur KUR. Sosialisasi pun digencarkan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan pelaksana KUR. Sejauh ini penyaluran KUR di Jawa Tengah masih dilakukan oleh BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Maybank. "Kemungkinan Bank Jateng akan ikut menyalurkan KUR, saat ini proses perizinan untuk menjadi penyalur sedang dilakukan," kata dia.

Hingga Juni, penyaluran KUR di Jawa Tengah sudah mencapai Rp 10,01 triliun dari target Rp 15,26 triliun tahun ini. Secara rinci, penyaluran KUR di Jawa Tengah tersebut untuk sektor mikro sebanyak Rp 7,67 triliun, sektor ritel sebanyak Rp 2,4 triliun, dan untuk modal kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Rp 3 miliar. Layanan KUR ini diakses 564.040 debitur. ■ antara edo: ifritat

1.	☐ Netral
2.	
3.	
4.	
5.	
Bog. P3ADK Dinopas	
a/ Positif f	
b/ Biasa	
c/ Untuk diketahui	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perencanaan Pengemb. P	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pengelolaan Pasar			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005